# ANALISIS PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

**A R T I K E L  I L M I A H**


Oleh :

**ELNA ARLINA NANDASARI**

**2012310785**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBAN**

**SURABAYA**


**2015**

# PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Elna Arlina Nandasari |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Surabaya, 14 September 1994 |
| N.I.M | : | 2012310785 |
| Jurusan | : | Akuntansi |
| Program pendidikan | : | Strata 1 |
| Konsetrasi | : | Audit dan Perpajakan |
| Judul | : | Analisis Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* |

**Disetujui dan diterima baik oleh :**

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 29 Februari 2016

**(Suprivati, S.E., M.Si., Ak., CA.,CTA)**

Co. Dosen Pembimbing,

Tanggal : 29 Februari 2016

**(Dewi Murdiawati, SE., MM)**

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

Tanggal : 29 Februari 2016

**(Dr. Luciana Spica Almilia, SE., M.Si)**

# *ANALYSIS OF EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE OF TAX AVOIDANCE*

Elna Arlina Nandasari
Perbanas Surabaya
Email: elnaarlinanandasari.ea@gmail.com
Jl. Nginden Semolo 34 -36 Surabaya

***Abstract***

*The purpose of this research is to find out the effect of corporate governance on tax avoidance in the mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2007-2014 period. proxy of corporate governance used in this study consisted of the audit committee, audit quality, independent board, executive compensation, institutional ownership, and public ownership. Population of this research is a mining company listed on the Indonesian Stock Exchange from 2007 to 2014. Results of this study can be concluded that only the independent board that has an influence on tax avoidance. While the audit committee, the quality audit, executive compensation, institutional ownership and public ownership has no influence on tax avoidance*

***Keywords:*** *tax avoidance, audit committees, audit quality, independent board, executive compensation, institutional ownership, and public ownership.*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa adanya timbal balik secara langsung. Pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak akan disalurkan kembali oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat melalui pengembangan dan pembangunan negara. Proses pengembangan dan pembangunan negara membutuhkan penerimaan pajak yang tinggi sehingga pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak guna meningkatkan pendapatan negara. Namun, dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak tidak terlepas dari beberapa kendala, terlebih lagi sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* yang berarti bahwa sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab kepada para wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini yang menyebabkan banyaknya praktik penghindaran pajak *(tax avoidance)* yang dilakukan oleh wajib pajak. Penghindaran pajak *(tax avoidance*) didefinisikan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi dianggap tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain tidak diinginkan karena merugikan negara dari segi penerimaan negara. Saat ini tidak sedikit perusahaan melakukan *tax avoidance* (praktik penghindaran pajak), sebagai contoh Apple perusahaan *gadget* dengan kualitas kelas atas, ternyata juga melakukan praktik penghindaran pajak. Apple membayar pajak dengan sangat rendah di Amerika Serikat, dengan skema pajak tertentu lalu membuat *holding company* di Irlandia yang merupakan *tax heaven country* (Sheppard, 2014). Tak ketinggalan di Indonesia ternyata praktik penghindaran pajak juga banyak terjadi. Pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan

melaporkan rugi dalam 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Rahmi, 2014). Laporan dari *Global Financial Integrity* (GFI) yang mencatat bahwa pada akhir tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat ke sembilan sebagai salah satu negara berkembang yang paling dirugikan akibat adanya praktek penghindaran pajak dalam periode 2001-2010 dengan potensi kerugian sebesar US$109 miliar (www.lampost.co).

Kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh suatu perusahaan dipengaruhi *corporate governance* . Ada beberapa proksi yang dapat menjadi alat ukur *corporate governance* yaitu komite audit, kualitas audit, dewan komisaris independen, kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional dan kepemilikan saham publik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwis (2009) yang mengatakan bahwa praktek *corporate governance* di perusahaan dapat diproyeksi dengan keberadaan komisaris independen, kepemilikan managerial, kepemilikan institusional dan klasifikasi akuntan publik.

Keberadaan variabel dewan komisaris independen menunjukkan hasil yang berbeda-beda pada setiap penelitian. Pohan (2008) menemukan bukti adanya pengaruh positif antara dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* namun bertentangan dengan hasil penelitian Silvia dan Puji (2014). Selain itu, komite audit juga menunjukkan hasil yang berbeda antar penelitian. Hal ini terbukti dari penelitian Nuralifmida (2012) dan Pohan (2008) yang mengatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan I Gusti dan Ketut (2014) dan Silvia dan Puji (2014) menunjukkan pengaruh negatif.

Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti dan Ketut (2014) menunjukan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* namun berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuralifmida (2012) dan Pohan (2008). Penelitian ini termotivasi dari peneliti-peneliti yang sebelumnya menghasilkan hasil yang beragam serta menindak lanjuti keterbatasan–keterbatasan yang terjadi pada penelitian sebelumnya yang salah satunya adalah keterbatasan periode penelitian. Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan objek yang berbeda yaitu perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Perusahaan sektor pertambangan merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Namun, banyak perusahaan pertambangan yang cukup bermasalah. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkapkan, sekitar 60 persen perusahaan tambang di Indonesia tak membayar pajak dan royalti kepada Negara. Menurut Abraham, banyaknya perusahaan tambang yang mangkir dari kewajiban membayar pajak karena adanya kesepakatan ilegal dengan aparat dan pejabat di daerah (www.kompas.com).

Periode penelitian adalah tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 dimana periode tersebut merupakan periode data perusahaan yang terbaru sehingga data tersebut dapat merefleksikan keadaan perusahaan saat ini. Data yang diambil adalah delapan tahun terakhir karena pada tahun 2007 penurunan target penerimaan Negara mengalami penurunan karena terjadinya krisis ekonomi di Amerika Serikat yang berakibat pada pergeseran nilai-nilai ekonomi dunia salah satunya perusahaan sektor tambang di Indonesia. (www.investasi.kontan.co.id). Sedangkan, ditahun 2014 adalah tahun terakhir alasan perusahaan tidak mengetahui dengan benar pembayaran pajak karena pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Pajak sudah menerapkan tahun pembinaan wajib pajak. Sehingga direntan periode 2007-2014.Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh komite audit, kualitas audit, dewan komisaris independen, kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, kepemilikan

saham publik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di BEI (Bursa Efek Indonesia) pada periode 2007-2014.

## RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

### Teori Keagenan

Pemikiran *corporate governance* bertumpu pada teori keagenan, yaitu pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Wolfensohn, 1999).

### *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang – undang yang ada (Mardiasmo, 2011:9). *Tax avoidance* berasal dari negara Inggris dalam kasus *The Duke of Westminster Case (IRC v Duke of Westminster,1936).* Hal tersebut didukung oleh Kasipillai (2012:28), kasus *The Duke of Westminster Case* berawal dari kesepakatan antara *The Duke of Westminster* dengan tukang kebunnya untuk merubah pembayaran gaji tukang kebunnya menjadi pembayaran anuitas. Perubahan tersebut sebagai balasan atas jasa-jasa yang telah dilakukan tukang kebunnya di masa lalu. Menurut peraturan perpajakan di Inggris pada saat itu, pembayaran anuitas tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajaknya Duke of Westminster, sedangkan pembayaran gaji merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan. Komisaris pajak melakukan koreksi atas pembayaran tersebut, dengan menyatakan bahwa pembayaran anuitas tersebut secara substansi merupakan pembayaran gaji, sehingga tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

### Corporate Governance

IICG *(The Indonesian Institute for Corporate Governance)* mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organisasi perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

### Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit digunakan karena bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (KNKG, 2006). Komite audit bertugas melakukan kontrol dan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan seperti tindakan penghindaran pajak.

Fenny (2015), Nuralifmida (2012), dan Pohan (2008) meneliti tentang pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* dan menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara penelitian Calvin dan I Made (2014) menyimpulkan bahwa keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

### Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Salah satu prinsip *corporate governance* adalah transparasi. Transparasi berarti keterbukaan informasi kepada para pemegang saham. Dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi, hal yang menjadi pertimbangan adalah informasi yang diberikan dari laporan keuangan yang telah diaudit. Semakin baik kualitas auditnya semakin baik pula informasi yang diberikan. Nuralifmida (2011) menyatakan bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh auditot KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga lebih menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh

karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non The Big Four*. KAP *The Big Four* terdiri dari :

1. Ernst & Young
2. Deloitte Touche Tohmatsu
3. Price Waterhouse Coopers
4. KPMG

Adapun Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang berafiliasi dengan KAP *The Big Four* adalah :

1. KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja - affiliate of Ernst & Young
2. KAP Osman Bing Satrio - affiliate of Deloitte
3. KAP Sidharta, Sidharta, Widjaja - affiliate of KPMG
4. KAP Haryanto Sahari - affilitae of PwC

Terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance.* Nuralifmida (2011) yang meneliti langsung hubungan antara kualitas audit dengan *tax avoidance* menemukan hasil yang signifikan dari kedua variabel tersebut. Sedangkan, I Gusti dan Ketut (2014) dan Fenny (2015) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance.*

**Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance***

Penelitian yang dilakukan Nuraflimida (2012) mengemukan bahwa pengaruh presentasi dewan komisaris independen di dalam suatu perusahaan adalah salah satu dari bentuk mekanisme peningkatan *corporate governance.* Apabila presentase dewan komisaris independen diatas 30% maka ini adalah salah satu indikator bahwa pelaksanaan *corporate governance* telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya agensi sehingga membuat praktik *tax avoidance* menurun. Senada dengan Nuraflimida (2012), Mayangsari (2003) menyebutkan bahwa keberadaan komite audit dan komisaris independen pada suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Dengan meningkatnya integritas laporan keuangan akan berdampak pada meningkatnya laba yang diharapkan perusahaan. Hal tersebut membuat dewan komisaris berusaha meminimalisir biaya-biaya yang ada terutama pajak.

**Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap *Tax Avoidance***

Kompensasi yang diberikan perusahaan rata-rata mencakup gaji, tunjangan, dan bonus. Gaji dan tunjangan bersifat tetap yang besarnya ditentukan oleh ketetapan perusahaan. Sedangkan, bonus diberikan apabila kinerjanya bagus dan perusahaan memiliki laba bersih yang besar. Untuk mendapat laba bersih yang besar, manajer cenderung untuk melakukan penghindaran pajak .

Gaertner (2011) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara laba setelah pajak dan total kompensasi CEO, yang mengindikasikan bahwa CEO yang diberi kompensasi dengan dasar setelah pajak meminta adanya tambahan untuk menanggung risiko tambahan. Selain itu, CEO yang diberi kompensasi dengan dasar insentif setelah pajak memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak.

**Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance***

Haruna dan Moser (2009) menyatakan bahwa stuktur *corporate governance* yang dilihat struktur kepemilikannya memberikan dampak pada perusahaan dalam mengelola urusan pajak mereka. Hal tersebut senada dengan Nurindah (2013) yang mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki kepemilikan institutional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya.

**Pengaruh Kepemilikan Saham Publik terhadap *Tax Avoidance***

Pemegang saham minoritas, atau sering disebut sebagai Pemegang saham publik sering disebut juga pemegang saham minoritas karena kepemilikan saham masing-masing tidak lebih dari 5% kepemilikan. Struktur kepemilikan saham publik menggambarkan kekuatan pengaruh masyarakat terhadap perusahaan.

Silvia dan Puji (2014) mengemukakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan oleh publik, dikatakan bahwa konsentrasi kepemilikan perusahaan tersebut lemah, dan tata kelola kurang baik. Selain itu, kepemilikan oleh publik juga memiliki karakteristik seperti masyarakat pada umumnya, yang mengharapkan perusahaan memberikan kontribusi untuk pembangunan dalam bentuk pembayaran pajak. Maka dengan semakin besar kepemilikan saham publik dalam perusahaan, penghindaran pajak perusahaan akan semakin rendah.

Berikut adalah kerangka pemikiran dalam penilitian ini :

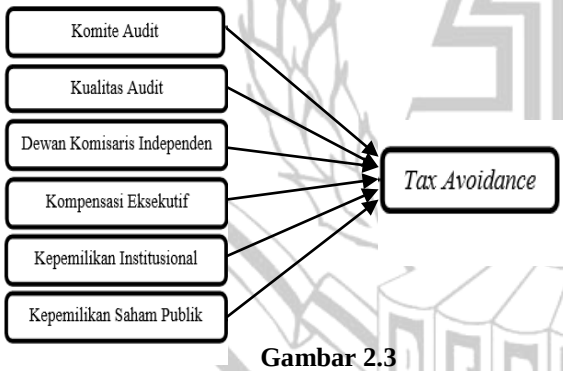


**Gambar 2.3**
**KERANGKA PEMIKIRAN**

**Hipotesis Penelitian**

H1:Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

H2:Kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

H3:Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

H4:Kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

*H5*:Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

H6:Kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

## METODE PENELITIAN

**Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dat dengan tipe kuantitatif, yaitu informasi datanya dalam satuan numerik, bersifat bulat atau pecahan dan interval. Data yang didapat bersifat sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber yang menerbitkannya dan siap untuk digunakan(Tony Wijaya, 2013:19).

**Identifikasi Variabel**

Analisis data pada penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang terdiri dari variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variabel*). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Sedangkan, variabel bebas dalam penelitian ini adalah *corporate governance.*

**Definisi Operasional dan Penggukuran Variabel**

***Variabel Tax Avoidance***

*Tax avoidance* didefinisikan sebagai besar pengurangan utang pajak yang dilakukan perusahaan. *Tax Avoidance* pada penelitian ini dihitung dengan cara CETR (*cash effective tax rate*). CETR (*cash effective tax rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Dyreng at al., 2010). *CETR* digunakan karena diharapkan dapat mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak suatu perusahaan (Chen et al. 2010). CETR dihitung dengan rumus:

$$\text{CETR} = \frac{\textit{Pajak yang dibayarkan perusahaan}}{\textit{Laba sebelum pajak}}$$

Keterangan:

CETR : *Cash Effective Tax Rate*

*Cash Tax Paid* : Pajak yang dibayarkan perusahaan

Pre – *tax income* : Laba sebelum pajak

Dalam penelitian ini *tax avoidance* dilambangkan dengan **CETR**

***Variabel Komite Audit***

Komite audit menurut Kep.29/PM/2004 merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Variabel komite audit dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala rasio melalui presentase anggota komite audit yang berasal dari luar komite audit terhadap seluruh anggota komite audit (Calvin dan I Made, 2014). Komite audit dapat diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut :

$$KMA = \frac{\text{Jumlah anggota dewan komite audit dari luar}}{\text{Jumlah seluruh anggota komite audit}}$$

Komite audit dilambangkan dengan **KMA.**

***Variabel Kualitas Audit***

Kualitas audit dalam penelitian ini diukur melalui proksi ukuran KAP *Four* dan KAP *non-Big Four* seperti dalam penelitian (Susiana dan Herawanty 2007). Yang termasuk KAP *The Big Four* yaitu:

1. Ernst & Young
2. Deloitte Touche Tohmatsu
3. Price Waterhouse Coopers
4. KPMG

Adapun Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang berafiliasi dengan KAP *The Big Four* adalah :

1. KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja - affiliate of Ernst & Young
2. KAP Osman Bing Satrio - affiliate of Deloitte
3. KAP Sidharta, Sidharta, Widjaja - affiliate of KPMG
4. KAP Haryanto Sahari - affilitae of PwC

Kualitas audit diukur dengan skala nominal melalui variabel *dummy*. Angka 1 digunakan untuk mewakili perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* dan angka 0 digunakan untuk mewakili perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP *non-Big Four.* Kualitas audit dilambangkan dengan **AUDIT.**

***Variabel Dewan Komisaris Independen***

Variabel dewan komisaris independen dalam penelitian ini diukur menggunakan persentase keberadaan dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan (Mayangsari, 2003). Dewan komisaris independen dapat diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut :

$$KI = \frac{\text{Jumlah anggota dewan komisaris dari luar perusahaan}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan}}$$

Dewan Komisaris Independen dilambangkan dengan **KI.**

***Variabel Kompensasi Eksekutif***

Penelitian sebelumnya menemukan beragam pengaruh dari kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Rego dan Wilson (2009), dan Armstrong, *et al.* (2012) mengukur kompensasi melalui komponen saham dan opsi saham. Hal tersebut akan membuat manajer memiliki motivasi serupa dengan pemegang saham yang lain. Manajer akan mengupayakan praktik penghindaran pajak demi memperbesar kekayaan perusahaan.

Silvia dan Puji (2014) mengemukakan bahwa perusahaan di Indonesia rata-rata menggunakan sistem kompensasi tanpa basis saham, yaitu terdiri dari gaji, tunjangan, dan bonus yang diberikan berdasarkan kinerja. Kompensasi eksekutif dapat diukur dengan menggunakan logaritma 10 total kompensasi setahun yang diterima dewan komisaris dan direksi. Kompensasi eksekutif dilambangkan dengan **KE.**

***Variabel Kepemilikan Institusional***

Besar kecilnya kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini kepemilikan institusional diukur menggunakan presentase (Khurana, 2009). Kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut :

$$INST = \frac{\text{Proporsi saham dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$$

Kepemilikan institusional dilambangkan dengan INST.

***Variabel Kepemilikan Saham Publik***

Kepemilikan saham publik merupakan saham yang dimiliki masyarakat (tidak terafiliasi dengan perusahaan) dan masing-masing tidak lebih dari 5% kepemilikan. Penelitian ini mengikuti Handayani (2007) yang mengukur kepemilikan saham oleh publik dengan menggunakan persentase sebagai berikut :

Data persentase kepemilikan saham publik diperoleh dari struktur pemegang saham dalam laporan tahunan perusahaan. Kepemilikan saham publik dilambangkan dengan **PUB.**

**Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel**

Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2007 sampai 2014. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yang dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Terdapat laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan selama delapan tahun berturut-turut (tahun 2007-2014) yang dapat diakses dari situs BEI (www.idx.co.id) atau dari situs perusahaan.
2. Perusahaan pertambangan. Pemilihan semua perusahaan pertambangan karena perusahaan pertambangan merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia.
3. Tahun buku dalam laporan keuangan tahunan berakhir tanggal 31 Desember. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseragaman sampel dan analisisnya.
4. Laporan keuangan tahunan disajikan menggunakan mata uang Rupiah. Penggunaan mata uang selain Rupiah, meskipun dapat dikonversi, perbedaan akibat kurs yang terus berubah.
5. Perusahaan sektor pertambangan yang laba bersih sebelum pajaknya tidak mengalami kerugian selama tahun 2007-2014.

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel yang dijabarkan sebelumnya, perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel dalam penelitian adalah sebanyak 7 perusahaan dengan 54 data Rincian mengenai pengurangan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1**
**METODE PEMILIHAN SAMPEL PENELITIAN**

| Keterangan | Perusahaan | Periode | Jumlah Data |
|---|---|---|---|
| 1. Jumlah perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia | 41 | 8 | 328 |
| 2. Perusahaan sektor pertambangan yang tidak menggunakan satuan nilai rupiah dalam laporan keuangannya selama tahun 2007-2014 | (25) | 8 | (200) |
| 3. Perusahaan sektor pertambangan yang mengalami kerugian | (8) | 8 | (64) |
| 4. Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara berturut – turut pada periode 2007-2014 | (1) | 8 | (8) |
| Jumlah data pengamatan selama delapan tahun | 7 | 8 | 56 |
| Jumlah sampel outlier | | | (2) |
| Total data yang digunakan | | | 54 |

Sumber : Data diolah

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

**Analisis Deskriptif**

Pada analisis deskriptif, peneliti akan memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang diteliti dari segi nilai minimun, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi.

**Tabel 2**
**STATISTIK DESKRIPTIF**

Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| CETR | 54 | ,017749190855 | ,998037036076 | ,28161054795754 | ,186123262132725 |
| KMA | 54 | ,3333333333 | 1,0000000000 | , 55207231040 | , 152791063055 |
| AUDIT | 54 | 0 | 1 | ,50 | ,505 |
| KI | 54 | ,2 | ,5 | ,386 | ,0765 |
| KE | 54 | 8,292366846636 | 10,883201350320 | 9,86331046777206 | ,525662904562928 |
| INST | 54 | ,000000000000 | ,978259123062 | ,56947093068957 | ,263906484948248 |
| PUB | 54 | ,021740876938 | ,678622121712 | ,30619051760340 | ,150075934682500 |
| Valid N (listwise) | 54 | | | | |

Sumber : Data diolah

*Tax Avoidance* pada penelitian ini dihitung dengan cara CETR (*cash effective tax rate*). CETR (*cash effective tax rate*) perusahaan diukur dari beban pajak dibandingkan laba sebelum pajak. Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa tingkat *tax avoidance* yang diproksikan melalui CETR pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2014 rata-rata sebesar 0,28161054795754. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki nilai CETR diatas nilai rata-rata melakukan praktik penghindaran pajak *(tax avoidance)* yang rendah karena beban pajaknya lebih besar dibandingkan dengan laba sebelum pajaknya. Perusahaan sampel yang memiliki nilai CETR diatas nilai rata-rata sebanyak 25 perusahaan atau 46,3% dari total sampel. Nilai CETR tertinggi dimiliki oleh PT Mitra Investindo Tbk dengan nilai sebesar 0,998037036076 atau 99% pada tahun observasi 2008. Sedangkan perusahaan sampel yang memiliki nilai CETR dibawah nilai rata-rata sebanyak 29 perusahaan atau 54,7% dari total sampel. Nilai CETR terendah dimiliki oleh PT Ratu Prabu Energi Tbk, yaitu sebesar 0,017749190855 atau 1,7% pada tahun observasi 2013. Perusahaan yang memiliki nilai CETR dibawah nilai rata-rata melakukan praktik penghindaran pajak *(tax avoidance)* yang tinggi karena beban pajaknya lebih rendah dibandingkan dengan laba sebelum pajaknya. Untuk mendapatkan beban pajak yang rendah, perusahaan melakukan beberapa cara di antaranya dengan penentuan *transfer princing* yang tidak wajar, memasukkan penjualan di negara dengan tarif pajak rendah, membebankan biaya di negara dengan tarif pajak tinggi, berusaha untuk mendapatkan fasilitas pajak yang sebenarnya fasilitas pajak tersebut tidak ditujukan padanya, membuat transaksi berputar-putar yang akhirnya transaksi tersebut akan kembali lagi kepadanya (*round-robin flow of funds*), membuat pengeluaran menjadi *non deductable expenses*, penggelembungan nilai aset untuk mendapatkan biaya penyusutan yang besar dimasa yang akan datang, memanfaatkan suatu entitas usaha di mana penghasilan yang diterima oleh entitas usaha tersebut dikecualikan sebagai objek pajak, dan memanfaatkan celah undang-undang negara setempat.

Komite audit (KMA) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala rasio melalui presentase anggota komite audit yang berasal dari luar komite audit terhadap seluruh anggota komite audit. Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan komite audit dari luar perusahaan (komite

audit independen) selama delapan tahun periode pengamatan dengan sampel (N) sebanyak 54 data laporan perusahaan sektor pertambangan yang memiliki nilai minimum sebesar 0,333333333333 dimiliki oleh PT. Citatah Tbk dan PT. Mitra Investindo Tbk pada periode tahun 2012 hingga 2014 dan nilai maksimum sebesar 1,000000000000 dimiliki oleh PT. Ratu Prabu Energi Tbk pada tahun observasi 2009 sedangkan untuk nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,55207231040564 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,152791063055750. Nilai rata-rata tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata sampel sudah memenuhi batas minimal dari peraturan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 30%.

Kualitas audit diukur dengan skala nominal melalui variabel *dummy*. Angka 1 digunakan untuk mewakili perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* dan angka 0 digunakan untuk mewakili perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP *non-Big Four*. Nilai minimum kualitas audit sebesar 0, nilai maksimum sebesar 1, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,5, serta dengan nilai standar deviasi sebesar 0,505.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan memiliki kualitas laporan keuangan yang tidak terlalu baik dikarenakan jumlah KAP *big four* yang digunakan oleh perusahaan sampel sama dengan jumlah KAP *non big four*. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP *big four* cenderung akan menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan dengan KAP *non big four*. Dengan kualitas audit yang tinggi maka akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya karena menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya sehingga akan meminimalisir pihak manajemen perusahaan untuk melakukan tindak kecurangan termasuk kecurangan dalam pajak.

Dalam penelitian ini dewan komisaris independen (KI) diukur dari persentase dewan komisaris independen yaitu jumlah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dibagi dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Dari tabel 2, pada variabel KI diketahui bahwa masih ada perusahaan yang belum memenuhi ketentuan Bursa Efek Indonesia, yaitu sekurang-kurangnya 30% dari jumlah komisaris adalah komisaris independen yang menunjukkan nilai minimal 0,2 atau 20%. Nilai minimal 0,2 dimiliki oleh PT. Timah (Persero) Tbk dan PT. Mitra Investindo Tbk pada tahun observasi 2014. Nilai maksimum sebesar 0,5 dimiliki oleh PT. Ratu Prabu Energi Tbk pada tahun observasi 2007 hingga 2014, PT. Mitra Investindo Tbk pada tahun observasi 2010 hingga 2013, dan PT. Timah (Persero) Tbk pada tahun observasi 2013. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,386, serta dengan nilai standar deviasi sebesar 0,0765. Nilai rata-rata variabel KI sebesar 0,386 atau 38,6% mengindikasikan bahwa rata-rata sampel sudah memenuhi batas minimal dari peraturan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 30%.

Kompensasi eksekutif adalah kompensasi yang diterima direksi dan dewan komisaris selama satu tahun. Kompensasi eksekutif dapat diukur dengan menggunakan logaritma 10 total kompensasi setahun yang diterima dewan komisaris dan direksi. Pada tabel 2 kompensasi eksekutif (KE) terendah sebesar 8,292366846636 yang merupakan nilai logaritma 10 dari total kompensasi yang diterima dewan komisaris dan direksi selama satu tahun Rp 196.050.000 dari PT. Ratu Prabu Energi Tbk pada tahun 2007 sedangkan kompensasi eksekutif (KE) tertinggi sebesar 10,883201350320 yang merupakan nilai logaritma 10 dari total kompensasi yang diterima dewan komisaris dan direksi selama satu tahun Rp 76.419.000.000 dari PT. Bukit Asam (Persero) Tbk pada tahun 2014. Nilai rata-rata 9,86331046777206 menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan yang menjadi

sampel memberikan kompensasi ekskutif yang tinggi. Tingginya kompensasi eksekutif yang diberikan mengindikasikan bahwa kinerja keuangan perusahaan tersebut bagus serta perusahaan memiliki kemampuan menghasilkan profit yang besar. Standar deviasi 0,525662904562928 dengan nilai rata-rata 9,86331046777206 menunjukkan bahwa sebaran data kurang merata. Hal ini menyebabkan data yang diperoleh homogen.

Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan skala rasio melalui jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dibandingkan dengan total saham yang beredar. Hasil analisa diskriptif yang terlihat didalam tabel 2 kepemilikan institusional memiliki rata-rata 0,56947093068957 dengan standart deviasi sebesar 0,263906484948248 bisa diartikan bahwa rentang atau jarak antara data satu dengan lainnya adalah sebesar 0,263906484948248. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,56947093068957 atau 56,94%. Hal ini berarti 56,94% saham yang beredar dalam perusahaan dimiliki oleh pihak institusional perusahaan sisanya 43,06% dimiliki oleh pihak internal perusahaan atau masyarakat (publik). Standart deviasi lebih kecil dari rata-rata menunjukkan variasi dari kepemilikan institusional terbilang rendah dengan nilai minimum 0,0000000 berasal dari PT Ratu Prabu Energi Tbk pada tahun observasi 2009, 2010, 2011 dan 2014 sedangkan maksimum 0,978259123062 berasal dari PT Elnusa Tbk. pada tahun observasi 2007. Tingginya kepemilikan institusional berarti semakin banyak saham yang dimiliki oleh institusi dan dapat dikatakan pengawasannya juga semakin ketat.

Kepemilikan saham publik dalam penelitian ini diukur dengan skala rasio melalui jumlah saham yang dimiliki oleh publik dibandingkan dengan total saham yang beredar. Dari hasil analisa diskriptif yang terlihat didalam tabel 2 nilai minimum variabel kepemilikan saham publik (PUB) sebesar 0,021740876938 dimiliki oleh PT Elnusa Tbk. sedangkan nilai maksimum sebesar 0,678622121712 dimiliki oleh PT Mitra Investindo Tbk. Nilai rata-rata sebesar 0,30619051760340 menunjukkan bahwa prosentase yang dimilki publik cenderung rendah. Kepemilikan publik yang rendah dapat diartikan bahwa ruang gerak pihak manajemen semakin luas dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh publik terhadap pihak manajemen rendah dengan begitu kesalahan-kesalahan yang mungkin akan dilakukan pihak manajemen semakin besar. Rendahnya prosentase kepemilikan publik teresbut dapat dipicu dari kinerja perusahaan itu sendiri, semakin rendah kinerja perusahaan maka berdampak pada semakin rendahnya ketertarikan inverstor untuk bekerjasama dalam hal menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Kepemilikan saham publik memiliki nilai standar deviasi 0,150075934682500.

**Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi secara normal atau tidak. Pada penelitian ini, uji normalitas yang digunakan yaitu uji statistik nonparametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S).

**Tabel 3**

**HASIL UJI NORMALITAS SEBELUM OUTLIER**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|---|---|---|
| N | | 56 |
| Normal Parameters[a,b] | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | ,28108305 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,190 |
| | Positive | ,190 |
| | Negative | -,128 |
| Test Statistic | | ,190 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,000[c] |

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 3 mengenai uji normalitas pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia, tercermin nilai Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan nilainya jauh di bawah α = 0,05. Hal ini mencerminkan bahwa H0 ditolak yang artinya data residual tidak terdistribusi normal. Data yang dinyatakan tidak terdistribusi normal dapat dilakukan dengan menggunakan *outlier data* atau membuang data yang tidak sesuai dengan menetapkan kriteria data yang memiliki nilai z_residual ≥ 2,5 hal tersebut dikarenakan data hanya berjumlah 56 (< 80). Peneliti melakukan *outlier data* sebanyak dua data perusahaan yang memiliki nilai dengan rentang sangat jauh (z_residual ≥ 2,5), sehingga diperoleh hasil seperti tabel berikut:

**Tabel 4**
**HASIL UJI NORMALITAS SETELAH OUTLIER**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|---|---|---|
| N | | 54 |
| Normal Parameters[a,b] | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | ,16008318 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,112 |
| | Positive | ,112 |
| | Negative | -,068 |
| Test Statistic | | ,112 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,090[c] |

Sumber : Data diolah

Hasil uji normalitas dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* di atas menunjukkan bahwa dengan jumlah sampel 54 besarnya nilai pada *Kolmogrov-Smirnov Z* sebesar 0,112 dengan signifikansi 0,090. Dengan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi normal, karena nilai signifikansi dari uji normalitas untuk masing-masing variabel lebih besar dari α (α=0,05) yaitu 0,090 > 0,05.

**Uji Statistik F**

Uji Statistik F digunakan untuk menguji apakah model regresi fit atau tidak dan menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model dapat menjadi variabel penjelas atau prediktor. Berikut adalah hasil uji statistik F:

**Tabel 5**
**HASIL UJI STATISTIK F**

ANOVA[a]

| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regression | ,478 | 6 | ,080 | 2,756 | ,022[b] |
| | Residual | 1,358 | 47 | ,029 | | |
| | Total | 1,836 | 53 | | | |

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 5 diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 2,756 dengan tingkat signifikan 0,022, hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen dapat menjadi penjelas variabel dependen karena memiliki tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa maka Ho ditolak dan $H_a$ diterima, sehingga dapat disimpulkan variabel komite audit, kualitas audit, dewan komisaris independen, kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, dan kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2014 dan model dikatakan fit atau bagus. Dari hasil analisis regresi linear berganda diperoleh hasil sebagai berikut:

CETR = 0,623 – 0,850 KI + ε

Di mana :

CETR = *Cash Effective Tax Rate*
KI = Dewan komisaris independen
α = Konstanta persamaan regresi
ε = Error term

**Uji Koefisien Determinasi ($R^2$)**

Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R2*. Koefisien Determinasi pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Pada penelitian ini, model regresi digunakan untuk mengetahui besarnya *tax avoidance* yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya Semakin bagus penelitian adalah jika nilai *adjusted R square* menunjukkan angka mendekati 1 yang artinya hampir semua variabel independen memberikan informasi dalam memprediksi variabel dependen. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi:

**Tabel 6**
**HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI**

Model Summary[b]

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ,510[a] | ,260 | ,166 | ,1699944324 |

Sumber : Data diolah

Berdasarkan pada tabel 6, koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R2 sebesar 0,166 atau 16,6 %. Hal ini berarti bahwa komite audit, kualitas audit, dewan komisaris independen, kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, dan kepemilikan saham publik mampu mempengaruhi *tax avoidance* sebesar 16,6% sedangkan sisanya sebesar 83,4% dijelaskan oleh variabel lain. Besarnya koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,510. Ini berarti besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah cukup tinggi yaitu sebesar 51%. *Standar error of estimate* (SEE) sebesar 0,1699944324. Semakin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen, yaitu *tax avoidance*.

**Uji t (Uji hipotesis)**

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.. Dalam penelitian ini menguji pengaruh yang signifikan secara parsial antara komite audit, kualitas audit, dewan komisaris independen, kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, dan kepemilikan saham publik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang *terdaftar* di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2014 dengan membandingkan nilai signifikannya dengan (α) = 5%. Dikatakan berpengaruh siginifikan apabila nilai signifikan uji t ≤ 0,05 dan dikatakan tidak berpengaruh apabila nilai signifikan uji t lebih dari 0,05.

**Tabel 7**
**RANGKUMAN HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS**

| No | Hipotesis | Sig. | Koef. Determinasi | Kesimpulan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance.* | 0,994 | -0,014 | H1 ditolak | Tidak berpengaruh |
| 2. | Kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance.* | 0,603 | -0,016 | H2 ditolak | Tidak berpengaruh |
| 3. | Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance.* | 0,041 | 0,180 | H3 diterima | Berpengaruh |
| 4. | Kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance.* | 0,778 | 0,011 | H4 ditolak | Tidak berpengaruh |
| 5. | Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance.* | 0,146 | 0,077 | H5 ditolak | Tidak berpengaruh |
| 6. | Kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap *tax avoidance.* | 0,155 | -0,003 | H6 ditolak | Tidak berpengaruh |

Sumber : Data diolah

Berikut adalah pembahasan masing-masing variabel independen:

**Pengaruh Komite Audit (KMA) terhadap *Tax Avoidance***

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan seperti tindakan penghindaran pajak. Komite audit (KMA) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala rasio melalui presentase anggota komite audit yang berasal dari luar komite audit terhadap seluruh anggota komite audit.

Berdasarkan hasil hipotesis diperoleh temuan bahwa $H_0$1 diterima yang berarti variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena nilai sig-t komite audit sebesar 0,994 atau 99,4% lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,994 > 0.05). Seberapa banyaknya komite audit yang berasal dari luar (komite

audit independen) dalam perusahaan tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Hal ini disebabkan dewan komisaris memiliki peran pengambilan keputusan lebih besar daripada komite audit perusahaan sekalipun komite audit tersebut berasal dari luar perusahaan. Selain peran pengambilan yang tidak terlalu besar, tidak berpengaruhnya komite audit terhadap *tax avoidance* disebabkan ketidak mampuan komite audit independen menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap struktur pengendalian internal perusahaan serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh audit internal dengan baik sehingga praktik penghindaran pajak *(tax avoidance)* yang dilakukan oleh pihak-pihak tetentu tidak dapat terdeteksi oleh komite audit.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Calvin dan I Made (2014) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Nuralifmida (2012) dan Pohan (2008) yang menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

**Pengaruh Kualitas Audit (AUDIT) terhadap *Tax Avoidance***

Salah satu prinsip *corporate governance* adalah transparasi. Transparasi berarti keterbukaan informasi kepada para pemegang saham. Dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi, hal yang menjadi pertimbangan adalah informasi yang diberikan dari laporan keuangan yang telah diaudit. Semakin baik kualitas auditnya semakin baik pula informasi yang diberikan. Nuralifmida (2011) menyatakan bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh auditot KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga lebih menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non The Big Four*. Kualitas audit pada penelitian ini diukur dengan skala nominal melalui variabel *dummy*. Angka 1 digunakan untuk mewakili perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* dan angka 0 digunakan untuk mewakili perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP *non-Big Four*.

Berdasarkan hasil hipotesis diperoleh temuan bahwa $H_0$2 diterima yang berarti variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena nilai sig-t kualitas audit sebesar 0,603 atau 60,3% lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,603 > 0.05). Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan audit yang dilakukan oleh KAP lebih tertuju pada audit laporan keuangan. Dimana audit laporan keuangan tersebut bertujuan menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan atau akuntansi yang berterima umum tidak sampai mengukur ada tidaknya kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan khususnya kecurangan dalam perpajakan yang salah satunya yaitu *tax avoidance*. Sedangkan yang lebih berwewenang dalam mengukur ada tidaknya kecurangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yaitu auditor forensik.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Fenny (2015) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Nuralifmida (2012) dan Pohan (2008) yang menyimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

**Pengaruh Dewan Komisaris Independen (KI) terhadap *Tax Avoidance***

Dewan komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan perusahaan, komisaris, direksi dan pemegang saham utama. Dalam penelitian ini dewan komisaris independen (KI) diukur dari persentase dewan komisaris

independen yaitu jumlah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dibagi dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Berdasarkan hasil hipotesis diperoleh temuan bahwa $H_0$3 ditolak yang berarti dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance.* Pertama dewan komisaris independen telah menunjukkan independensinya mengenai tugas pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan, dan memberikan nasihat kepada direktur untuk kepentingan perusahaan berjalan dengan baik, sehingga pengawasan terhadap pihak manajemen dalam melakukan *tax avoidance* dapat berjalan dengan baik pula. Kedua, dewan komisaris independen sudah tanggap dalam memperhatikan ada tidaknya tindakan-tindakan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan dimana salah satunya berupa tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance)* yang merupakan penghematan beban pajak.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Nuraflimida (2012) yang menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Nuraflimida (2012) menyimpulkan bahwa pengaruh presentasi dewan komisaris independen di dalam suatu perusahaan adalah salah satu dari bentuk mekanisme peningkatan *corporate governance.* Apabila presentase dewan komisaris independen diatas 30% maka ini adalah salah satu indikator bahwa pelaksanaan *corporate governance* telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya agensi sehingga membuat praktik *tax avoidance* menurun.

Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Sivia dan Puji (2014), menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

variabel dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena nilai sig-t kualitas audit sebesar 0,041 atau 4,1 % lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,041 < 0.05). Terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan

**Pengaruh Kompensasi Eksekutif (KE) terhadap *Tax Avoidance***

Kompensasi eksekutif menggambarkan kompensasi yang diterima direksi dan dewan komisaris selama satu tahun. Kompensasi eksekutif dapat diukur dengan menggunakan logaritma 10 total kompensasi setahun yang diterima dewan komisaris dan direksi.

Berdasarkan hasil hipotesis diperoleh temuan bahwa $H_0$4 diterima yang berarti variabel kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena nilai sig-t kualitas audit sebesar 0,778 atau 77,8% lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,778 > 0.05). Hal tersebut mengindikasikan bahwa besar kecilnya kompensasi yang diterima pihak eksekutif tidak memotivasi pihak eksekutif dalam pengambilan keputusan pajak perusahaan termasuk keputusan dalam melakukan penghindaran pajak *(tax avoidance).* Tidak termotivasinya pihak eksekutif melakukan penghindaran pajak dikarenakan pihak eksekutif memiliki komitmen, loyalitas, dan integritas yang tinggi kepada perusahaan sedangkan kompensasi sendiri hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi. Pihak esksekutif hanya mementingkan tujuan perusahaan untuk menjadikan tata kelola perusahaan baik yang salah satunya membuat perusahaan menghasilkan profit yang tinggi dengan tetap menaati peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Silvia dan Puji (2014) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Gaertner (2011) menemukan bahwa terdapat hubungan

positif antara laba setelah pajak dan total kompensasi CEO.

**Pengaruh Kepemilikan Institusional (INST) terhadap *Tax Avoidance***

Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan skala rasio melalui jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dibandingkan dengan total saham yang beredar.

Berdasarkan hasil hipotesis diperoleh temuan bahwa $H_0$5 diterima yang berarti variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena nilai sig-t kualitas audit sebesar 0,146 atau 14,6 % lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,146 > 0.05). Terdapat beberapa alasan mengapa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.* Pertama, pemilik institusional diduga mempercayakan pengawasasn dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris sehingga ada tidaknya kepemilikan institusional tidak mempengaruhi ada tidaknya *tax avoidance*. Kedua, pihak institusional tidak terlibat secara aktif dalam operasional perusahaan. Ketiga, pihak institusional kurang peduli dengan citra perusahaan asalkan bisa menguntungkan bagi pemilik institusional walaupun adanya indikasi kecurangan pada keputusan manajemen termasuk dalam melakukan *tax avoidance.*

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Fenny (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Haruna dan Moser (2009) menyatakan bahwa stuktur *corporate governance* yang dilihat struktur kepemilikannya memberikan dampak pada perusahaan dalam mengelola urusan pajak mereka. Hal tersebut senada dengan Nurindah (2013) yang mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki kepemilikan institutional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya. Perbedaan hasil ini mungkin berkaitan dengan sampel data yang menunjukkan bahwa masih terdapat perusahaan sektor pertambangan yang sahamnya tidak dimiliki oleh pihak institusional. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai minimum kepemilikan institusional sebesar 0,000000000.

**Pengaruh Kepemilikan Saham Publik (PUB) terhadap *Tax Avoidance***

Kepemilikan saham publik menunjukkan kekuatan pengaruh masyarakat terhadap perusahaan. Kepemilikan saham publik dalam penelitian ini diukur dengan skala rasio melalui jumlah saham yang dimiliki oleh publik dibandingkan dengan total saham yang beredar.

Berdasarkan hasil hipotesis diperoleh temuan bahwa $H_0$6 diterima yang berarti variabel kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena nilai sig-t kualitas audit sebesar 0,155 atau 15,5 % lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,155 > 0,05). Kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* diduga karena pemilik saham publik tidak terlibat secara aktif operasional perusahaan dengan mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris, mereka hanya melihat hasil yang mereka peroleh sehingga ada tidaknya *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh kepemilikan saham publik.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Silvia dan Puji (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance.*

## KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN KETERBATASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit, kualitas audit, dewan komisaris independen, kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, dan kepemilikan saham publik terhadap *tax*

*avoidance*. Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *Indonesia Capital Markets Directory* (ICMD) *dan www.idx.co.id*. Metode pengambilan sampel penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling.* Setelah dilakukan pembuangan outlier, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi 54 data. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, normalitas, dan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hanya variabel dewan komisaris independen yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2007-2014, sedangkan variabel komite audit, kualitas audit, kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, dan kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2007-2014. Hal ini diduga karena dewan komisaris memiliki peran pengambilan keputusan lebih besar daripada komite audit perusahaan sekalipun komite audit tersebut berasal dari luar perusahaan, audit yang dilakukan oleh KAP lebih tertuju pada audit laporan keuangan, pihak eksekutif memiliki komitmen, loyalitas, dan integritas yang tinggi kepada perusahaan sedangkan kompensasi sendiri hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi, serta pemilik institusional dan pemilik saham publik diduga mempercayakan pengawasasn dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris sehingga ada kepemilikan institusional dan kepemilikan saham publik tidak mempengaruhi ada tidaknya *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini masih memiliki keterbatasan penelitian yaitu terbatasnya sampel penelitian yang disebabkan oleh sedikitnya perusahaan sektor pertambangan yang menggunakan mata uang rupiah dan tidak mengalami kerugian secara berturut-turut selama periode penelitian yaitu 2007-2014 serta memasukkan perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional nol.

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan untuk melanjutkan penelitian ini dengan menambahkan populasi perusahaan yang dijadikan sampel penelitian tidak hanya perusahaan sektor pertambangan saja tetapi juga jenis industri lainya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Diharapkan menambahkan jumlah tahun pengamatan sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi.
3. Diharapkan dapat menggunakan perusahaan yang menggunakan mata uang selain rupiah dengan dikonversikan ke mata uang rupiah.
4. Dapat menambah beberapa variabel independen yang mungkin berpengaruh terhadap *tax avoidance*, misalkan kinerja keuangan, konservatisme akuntasi, *sales growth*, dan ukuran perusahaan.

## DAFTAR RUJUKAN


Annisa, N. A., & Kurniasih, L.2012. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi & Auditing, Vol.8*, 95 - 189.

Armstrong, C.S., J.L. Blouin, dan D.F. Larcker. 2012. “The incentives for tax planning.” *Journal of Accounting and Economics* 53 (2012), h. 391-411.

Chen, S., Chen, X., Cheng, Q dan Shevlin, T. 2010. *Are Family Firms More Tax Aggresive than Non-Family Firms? Journal of Financial Economics*, 95, 41-61.

Darwis, Herman. 2009. Corporate Governace Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 13, No. 3, September 2009, hal. 418-430.

Dyreng, Scott D.; Hanlon, Michelle; Maydew Edward L, 2010, *The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance*, *The Accounting Review*, 85, 1163-1189.

Friese, A., S. Link, dan S. Mayer. 2006. *Taxation and Corporate Governance. Working Paper.*

Gauthier, T.D. 2001. "Detecting Trends Using Spearman's Rank Correlation Coefficient." *Environmental Forensics* (2001) 2, 359-362.

Imam Ghozali, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Universitas Diponegoro: Semarang.

Handayani, C. 2007. "Analisis Pengaruh Proporsi Kepemilikan Saham Terhadap Kebijakan Pendanaan Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan." *Tesis*, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang.

Khurana, I. K. dan W. J. Moser. 2009. *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*.

KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*). 2006.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan edisi revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mayangsari, Sekar. 2003. Pengaruh Keahlian dan Independensi terhadap Pendapat Audit : Sebuah kuasi eksperimen. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol 6 No. 1 (Januari).*

Pohan, H. T. 2008. Pengaruh *Good Coorporate Governance, Rasio Tobin's q*, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik.

Puspita, S. R., & Harto, P. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, *3*(2), 1077-1089.

Rego, S., and R.Wilson. 2009. Executive Compensation, Tax Reporting Aggressiveness, and Future Firm Performance.*Working Paper*. University of Iowa.

Sheppard, L. A. 2014. Twilight of the International Consensus: How Multinationals Squandered Their Tax Privileges. *Wash. UJL & Pol'y*, *44*, 61.

Susiana & Herawaty, A. 2007. Analisis pengaruh independensi, mekanisme corporate governance, dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan.*Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makassar*.

Swingly, C., & Sukartha, I. 2015. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth Pada *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*,*10*(1), 47-62.

Tony Wijaya. 2013. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis Terori dan Praktik.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wolfensohn, J. 1999. *Corporate Governance.* Financial Times.

Xynas. 2011. *EffectiveTax Rates and The"Indstrial Policy" Hypotesis:evidence from Malaysia. Journal of International Accounting, Auditing, Auditing and Taxation,45-62*.

www.idx.co.id.

www.investasi.kontan.co.id

www.kompas.com

www.lampost.co

www.pajak.go.id

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
STIE
PERBANAS

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
STIE
PERBANAS

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
STIE
PERBANAS